

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM

SKRIPSI



**Oleh:
Diana Wahyuniati
161010026**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Diana Wahyuniati
161010026**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Diana Wahyuniati
NPM : 161010026
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi “Strategi Penanggulanga Kemiskinan di Kota Batam” ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi “ Strategi penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam” ini dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam” ini digugurkan dan gelar Sarjana Administrasi Publik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 30 Juli 2020



Diana wahyuniati

161010026

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Diana Wahyuniati
161010026**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 23 Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Azhar Abbas', with a large loop at the start and a horizontal line extending to the right.

Azhar Abbas, S.Sos., M.Si.

Pembimbing

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota Batam. Dimana strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sejauh ini masih belum efektif mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Salah satu program yang dilakukan pemerintah kota Batam adalah Bantuan Pangan Non Tunai dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk mengetahui strategi alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di kota Batam. metode yang digunakan adalah Analisis SWOT dimana untuk mengetahui apa saja Kekuatan (kekuatan), Kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan Ancaman (threats) dari strategi penanggulangan kemiskinan kota Batam melalui wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebagai informan yaitu kepala seksi bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan serta masyarakat yang menerima bantuan sosial. Hasil penelitian membuktikan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat belum mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan program tersebut hanya sekedar untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian saran untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dinas yang menangani masalah kemiskinan, untuk membuat program yang mendorong produktivitas masyarakat miskin agar mampu beranjak dari kemiskinan.

kata kunci: Kemiskinan, Strategi, Program, SWOT

ABSTRACT

Poverty is one of the problems facing the city of Batam. Where the poverty reduction strategies that have been implemented by the Social Service and Community Empowerment of Batam City so far have not been effective in reducing the amount of poverty that exists. One of the programs carried out by the Batam city government is Non-Cash Food Assistance and Uninhabitable Home Rehab. In connection with the problem under study, that is to find out alternative strategies that can be used by the government to tackle poverty in Batam. The method used is a SWOT analysis in which to find out what are the strengths, weaknesses, oppurtunities, and threats of the Batam city poverty reduction strategy through structured interviews with questions prepared earlier. As the informant, namely the section head for handling the poor, the Social and Empowerment Office and the community receiving social assistance. The results of the study prove that poverty reduction strategies implemented by the Office of Social and Community Empowerment have not been able to reduce poverty. This is because the program is only to help meet the basic needs of the poor. Based on the results of research suggestions for the Social Service and Community Empowerment as an agency that handles poverty issues, to create programs that encourage the productivity of the poor so they can move from poverty.

Keywords: Poverty, Strategies, Programs, SWOT

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Dr Hendri Herman, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
3. Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Administrasi Negara
4. Bapak Azhar Abbas, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membimbing penulis serta memberikan arahan sampai selesai skripsi ini.
5. Seluruh dosen Administrasi Negara yang sudah memberikan masukan pada skripsi saya
6. Ibu Fitriah, S.K.M., Selaku Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Yang sudah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Dinas

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan sudah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi sebagai narasumber

7. Bapak Ridhi Abdhi, S.H., selaku Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin Pesisir Yang sudah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan sudah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi sebagai narasumber
8. Kepada Kedua orang tua saya Papa saya yang bernama Erik Saputra dan Mama saya yang bernama Sri Riyanti yang banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil.
9. Kepada Muhammad Ridwan Iskandar yang sudah banyak memberikan dukungan dan memberikan semangat hingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu.
10. Kepada Atwiyah teman kelas saya yang sudah wisuda terlebih dahulu dan sudah banyak membantu dan memberikan masukan pada skripsi saya.
11. Kepada Jamiatus Solikha yang sudah banyak membantu dan memberikan masukan pada skripsi saya.
12. Kepada Vivi Ardinai dan Mirna teman kelas saya yang sudah memberikan semangat selama mengerjakan skripsi.
13. Semua Teman-teman Prodi Administrasi Negara angkatan 2016 di Universitas Putera Batam yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu saya.

14. Kepada Lurah dan para Staff Kelurahan Tiban Lama yang sudah membantu penulis untuk memberikan informan masyarakatnya yang bisa untuk diwawancara
15. Masyarakat Kelurahan Tiban Lama yang telah membantu penulis Melakukan Wawancara di

Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, amin.

Batam, 30 Juli 2020



Diana Wahyuniati

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	3
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR GAMBAR.....	13
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Manajemen Strategis	10
2.1.2 Karakteristik Manajemen Startegis	12
2.1.3 Manfaat Manajemen Strategis.....	12
2.1.4 Proses Manajemen strategis	12
2.2 kemiskinan.....	15
2.2.1 Bentuk-bentuk dan jenis-jenis Kemiskinan.....	17
2.2.2 Skema Terbentuknya Perangkat kemiskinan.....	20
2.2.3 Faktor yang memengaruhi Kemiskinan	23
2.3 Analisis SWOT.....	32
2.4 Penelitian Terdahulu.....	39

2.5 Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Fokus Penelitian	48
3.3 Metode Pengumpulan Data	49
3.4 Teknik Penmilihan Informan.....	49
3.5 Analisi Data	49
3.6 Keabsahan Data	50
3.7 Lokasi Penelitian	51
3.8 Jadwal Penelitian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran Umum.....	52
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	53
4.1.3 Struktur Organisasi	57
4.1.4 RTLH	58
4.2 Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	75
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kepri.....	2
Tabel 1.2 Jumlah penduduk Miskin Batam.....	3
Tabel 2.1 Matriks Analisis SWOT	38
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	52
Tabel 4.1 Rekapitulasi Penerima RTLH	65
Tabel 4.2 Faktor Internal dan Eksternal	72
Tabel 4.3 Matriks SWOT Hasil Penelitian	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	59
Gambar 4.2 Mekanisme Penyaluran BPNT	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan ialah jenis perkara yang sangat rumit dan bersifat multidimensi atau diperlukan solusi yang menyeluruh untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu perlu diketahui akar masalah yang sebenarnya terjadi di masyarakat miskin. Kemiskinan masih menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara. Perbedaan masalah kemiskinan yang dialami negara maju dan negara berkembang ada pada porsi atau besar kecilnya taraf ketimpangan dan juga angka kemiskinan yang ada. Luas daerah dan jumlah penduduk pada suatu negara yang berbeda-beda juga dapat memengaruhi hal tersebut.

Di Indonesia tingkat kemiskinan cukup tinggi baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan. Menurut Bank Dunia kemiskinan pedesaan di Indonesia jumlahnya cukup besar dari nilai absolut maupun tingkat (ratio) kemiskinan. Kemiskinan di pedesaan dikarenakan keterbatasan mengakses pekerjaan yang layak, kesehatan, pasar, dan pendidikan (Mengulas kemiskinan di desa, 2019). Sedangkan kemiskinan ditingkat perkotaan Walaupun tingkat kemiskinan di perkotaan lebih sedikit dibanding pedesaan tetapi masalah yang dihadapi lebih kompleks. Masalah kemiskinan jauh lebih kompleks karena tidak hanya menyangkut soal pekerjaan, pendapatan, perumahan, pendidikan, namun berkaitan pula dengan masalah sosial yang bersifat patologis seperti keturunan sosial, kerentanan terhadap kriminalitas, kekerasan, dll.

Untuk mengukur suatu kondisi kemiskinan, Indonesia menerapkan sebuah kecakapan di dalam mencukupi kebutuhan dasar atau (basic needs approach) yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di Dalam pendekatan ini, kemiskinan dinilai sebagai kondisi dimana terjadinya ketidakmampuan/tidak terpenuhinya sisi ekonomi atau saat individu tidak dapat menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan. Jadi bisa ditafsirkan Penduduk Miskin yaitu jika rata-rata pengeluaran perkapita perbulan yang dimilikinya berada dibawah garis kemiskinan.

Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat ke-sembilan dengan kepadatan penduduk sebesar 260 jiwa/km². dimana laju pertumbuhan penduduknya mengalami kenaikan signifikan pada setiap tahunnya (“10 Provinsi dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi di Indonesia, 2019). Dengan adanya banyak penduduk tentu saja banyak pula masalah yang dihadapi oleh provinsi Kepulauan Riau, salah satu masalah yang dihadapi dan menjadi atensi pemerintah ialah kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi cenderung bersifat fluktuatif.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kepulauan Riau

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2017	128.430
2	2018	125.360
3	2019	127.760

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau

Menurut tabel diatas terlihat bahwa jumlah orang miskin yang ada di Kepulauan Riau mengalami fluktuasi naik dan turun. Mulai dari tahun 2017 jumlah penduduk miskin Kepri sebanyak 128,430 ribu jiwa, lalu pada tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 125,360 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2019 meningkat sebanyak 127,760 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Jumlah kemiskinan di Kepri didominasi oleh masalah ketenagakerjaan terutama di perkotaan dimana perkembangan ekonomi di Kepri bergantung pada sektor industri dimana kenaikan jumlah penduduk miskin di Kepri akibat meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan.

Batam ialah kota yang memiliki taraf laju pertumbuhan penduduk paling tinggi di provinsi Kepri maka berdampak pada jumlah penduduk yang paling besar di Kepulauan Riau tercatat pada tahun 2019 pertumbuhan penduduk di kota Batam sebanyak 1.376.009 ribu jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk tentu saja berpengaruh pada jumlah orang miskin di kota Batam. Berikut data jumlah orang miskin yang ada di kota Batam

Tabel 1.2 Jumlah penduduk miskin kota Batam

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2017	61.160
2	2018	67.410
3	2019	66.210

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat jumlah penduduk miskin yang ada di kota Batam berdasarkan tabel diatas juga acap kali mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 penduduk miskin sebanyak 61,160 ribu jiwa, kemudian naik dengan signifikan sebanyak

67,410 ribu jiwa pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi sebanyak 66,210 ribu jiwa.

Salah satu adanya penyebab kemiskinan di kota Batam ialah banyak jumlah pendatang dari berbagai daerah seperti pulau jawa dan sumatera yang datang masuk ke batam dan menggantungkan hidupnya. laju pertumbuhan penduduk memang tinggi di kota batam menurut BPS jumlah pertambahan penduduk sebanyak 1.376.009 jiwa pada tahun 2019. di kota Batam tahun 2019 sebanyak 1.376.009 jiwa, angka ini mengalami peningkatan sebelumnya yaitu sebanyak 1.329.773 jiwa pada tahun 2018 atau pertambahan menjadi 234.193 jiwa (BPS kota Batam, 2019).

Dengan membludaknya pendatang tanpa disertai keterampilan yang mumpuni menambah masalah bagi kota Batam dimana jumlah pengangguran meningkat hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya para pencari kerja dari luar Batam. selain itu persaingan kerja di Kota Batam terus mengalami peningkatan. Minimnya lapangan pekerjaan membuat angka pencari kerja tidak pernah turun. Sebanyak 604.831 orang merupakan angkatan kerja, dari jumlah angkatan kerja yang ada penduduk yang bekerja atau produktif yaitu sebesar 550.813 jiwa dan yang belum terserap atau disebut dengan pengangguran terbuka (TPT) yaitu sebanyak 54.018 jiwa. Jumlah pengangguran tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,93 persen atau sebanyak 6.654 orang dibanding jumlah pengangguran tahun 2017 lalu (BPS kota Batam, 2019).

Pemerintah selaku pelaksana amanat kedaulatan rakyat tentu mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakatnya,

sebagaimana yang tertuang dalam Alinea ke-4 pada pembukaan UUD 1945. Salah satu implementasinya yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan. Dalam usaha menanggulangi kemiskinan baik pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan pelbagai hal dengan dibuatnya kebijakan dan program-program dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ada.

Pemerintah Kota Batam sendiri sudah memiliki strategi dalam menanggulangi kemiskinan dengan dibuatnya beberapa program. Pemerintah Kota Batam memiliki 10 faktor pengentasan kemiskinan dari sisi kebijakan pemerintah pusat dan dari pemerintah Kota Batam sendiri diantaranya: (1) BNPT/ Bantuan Pangan Non Tunai (2) Beasiswa pendidikan bagi siswa tidak mampu/KIP (3) PBI/ pembayaran iuran BPJS (4) Jamkesmas melalui KIS (5) Bantuan alat tangkap nelayan (6) Pelatihan koperasi dan usaha kecil (7) Beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa tidak mampu (8) Pelatihan wirausaha kepada keluarga tidak mampu (9) Bantuan mesin dan kapal nelayan (10) Sembako murah. Pelbagai program yang telah dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Program Keluarga harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (PKM), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesda, dan masih banyak lagi. Beraneka ragam kebijakan dan program guna menanggulangi kemiskinan di Kota Batam baik yang diluncurkan setiap departemen/kementerian serta dalam setiap provinsi ataupun kota/kab. Adapun pelbagai kebijakan serta program ini guna menangani masalah kemiskinan yang ada di Kota Batam.

Walaupun sudah banyak program yang pemerintah laksanakan guna membantu penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya maupun

program yang memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki kapabilitas untuk memiliki pendapatan dengan mandiri sehingga dengan seiringnya waktu pemerintah berharap orang miskin bisa keluar dari kondisi kemiskinannya, namun hasil yang diekspektasikan masih jauh. Hal ini terlihat dari masih konsisten jumlah penduduk miskin di Kota Batam yang naik turun atau fluktuatif. Hal ini membuktikan tingginya jumlah penduduk miskin yang sudah tersentuh program bantuan kemiskinan tetapi masih sama saja atau tidak berubah karena tidak beranjak dari kondisi miskin dimana bisa dikatakan bahwa kebijakan dan program yang sudah ada masih belum sepenuhnya optimal.

Strategi yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan masih saja berorientasi pada aspek ekonomi dimana akan terus mengalami kegagalan, hal tersebut terjadi karena masalah pengentasan kemiskinan hanya dilihat dari dalam aspek ekonomi dimana tidak mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya terjadi saat ini. Penyebab permasalahan kemiskinan yang ada di kota Batam dapat di golongkan menjadi 2 kategori, yang pertama yaitu kemiskinan absolut ialah kemiskinan yang mendera individu atau kolektif yang penghasilannya ada dibawah taraf kelayakan atau dibawah garis kemiskinan. yang kedua, yang kedua yaitu kemiskinan relatif ialah keadaan dimana suatu kebijakan yang bisa menimbulkan adanya kesenjangan penghasilan dan takaran kesejahteraan yang akan berujung pada banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan yang tersedia kurang atau tidak memadai.

Oleh sebab itu perlu strategi kebijakan untuk menangani masalah kemiskinan dengan tepat dan harus dengan menetapkan target yang diinginkan dan apa saja

efek yang diekspektasikan dari dilaksanakannya kebijakan yang dibuat. Hal tersebut lah yang mendasari peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut.

Menilik dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Syaparuddin dengan judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sorolangun” Hasil penelitian tersebut menyatakan pemerintah harus memiliki program untuk mengentaskan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada berkurangnya jumlah kemiskinan tetapi harus menitikberatkan pada proses usaha bagaimana caranya penduduk yang hidup di kondisi kemiskinan tidak akan kembali hidup miskin dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dengan mandiri.(Syaparuddin, 2014).

Berlandaskan latar belakang yang sudah diutarakan, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai kemiskinan dengan mengangkat judul **“Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam”**

1.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini bisa dilaksanakan lebih terfokus, sempurna, dan rinci maka penulis perlu membatasi variabel pada penelitian. Oleh karena itu penulis menentukan batasan penelitian ini hanya pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dimana satu dari sekian tupoksinya ialah menangani fakir miskin. Kemudian peneliti hanya meneliti program yang mana mewakili strategi kota Batam dalam menanggulangi kemiskinan melalui program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasar pada permasalahan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pada program bantuan sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di kota Batam?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat penulis, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan strategi alternatif yang tepat bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam.
2. Untuk memberikan deskripsi faktor-faktor pendukung dan penghambat pada Program bantuan sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian strategi penanggulangan kemiskinan ini ialah untuk:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman, literatur, serta saran untuk peneliti berikutnya yang akan meneliti mengenai strategi penanggulangan kemiskinan selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini diekspektasikan bisa memberi beberapa masukan untuk dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait dalam membuat strategi penanggulangan kemiskinan di kota Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Manajemen Strategis

Banyak definisi manajemen strategis yang dikemukakan oleh para ahli. salah satunya definisi yang dikemukakan J.David Hunger dengan Thomas L. Wheelen mendefinisikan manajemen strategis ialah keputusan serta tindakan dari manajerial yang ditujukan pada kinerja organisasi untuk kurun waktu yang lama. Definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam keputusan dan juga tindakan dalam manajemen strategis akan dilakukan tidak tunggal atau terdiri dari banyak pilihan-pilihan keputusan dan tindakan, sedangkan tujuan dari keputusan dan tindakan tersebut untuk kinerja organisasi bisa diterapkan untuk jangka waktu yang panjang bisa satu, dua, tiga, atau lima tahun selanjutnya.(Novianto Efri, 2019).

Tidak jauh berbeda dari pendapat Hunger dan Wheelen menurut Sondang P.Siagian dalam (Novianto Efri, 2019) mendefinisikan bahwa manajemen strategis merupakan serangkaian yang dibuat oleh pimpinan organisasi tertinggi berupa keputusan dan tindakan dimana untuk dipaksakan kepada seluruh perangkat organisasi agar tujuan dari organisasi yang sudah dicanangkan sebelumnya bisa tercapai.

Menurut Pearce II dan Robinson (2008) manajemen strategis ialah suatu kompilasi dari tindakan yang akan membuahkan perumusan (formulasi) dan penerapan (aplikasi) rencana-rencana yang dicanangkan untuk sampai pada sasaran-sasaran dalam organisasi tersebut (Yunus Eddy, 2016).

Berdasarkan pendapat oleh beberapa ahli, bisa dipetik kesimpulan bahwa manajemen strategis ialah beberapa serangkaian kegiatan dimana adanya kegiatan untuk mengambil keputusan yang bersifat elementer dan juga komprehensif, yang diikuti dengan metode penentuan implikasinya, dimana semua pimpinan dan semua pihak melaksanakannya juga guna mencapai tujuan yang diekspektasikan suatu institusi atau organisasi. Manajemen strategis merupakan sistem yang diterapkan sebagai satu keseluruhan yang terdiri atas pelbagai komponen yang saling terhubung, yang bisa memengaruhi satu sama lain sehingga dapat bergerak secara bersamaan untuk menuju ke direksi yang sama pula.

Berdasarkan pada lingkup pekerjaannya, manajemen strategis bisa dimanfaatkan pada lingkungan makro secara baik misalnya dalam manajemen pemerintah dan juga bisa dimanfaatkan pada lingkungan mikro dengan baik misalnya dalam manajemen perusahaan atau organisasi. Ada perbedaan yang elementer yang perlu dipahami dalam penetapan ruang lingkup makro dan mikro yaitu, sebagai berikut:

1. Perlu diperhatikan subjek dan juga objek yang ada pada kebijakan makro dalam suatu manajemen tersebut yaitu ialah masyarakat yang bersifat aggregate, sedangkan pada lingkup mikro fokusnya pun tetap tertuju pada subjek dan objek di suatu manajemen berupa individual rumah tangga perusahaan atau para konsumen yang memanfaatkan hasil produksi.
2. Mengenai perihal prinsip kerja untuk manajemen strategis makro kemungkinan atensi mengarah kepada efektivitas, sedangkan pada manajemen strategis yang cakupannya secara mikro harus selaras pada prinsip kerja yang efisien.

2.1.2 Karakteristik Manajemen Strategis

Manajemen strategis yang ini sangat beda dengan yang lain. Karena manajemen strategis selalu senantiasa menanggapi adanya perubahan pada lingkungan yang bisa memberi pengaruh terhadap penerapan manajemen itu sendiri, serta mengusahakan terealisasinya tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut pelbagai karakteristik yang ada pada manajemen strategis (Yunus Eddy, 2016):

1. Manajemen strategis memiliki sifat jangka panjang
2. Manajemen strategis memiliki sifat dinamis
3. Manajemen strategis sesuatu yang saling dalam manajemen operasional
4. Strategis perlu diinisiasi oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak.
5. Berorientasi dan mendekat kepada masa depan.
6. Manajemen strategis harus perlu disokong dalam penerapannya oleh semua sumber daya yang ada.

2.1.3 Manfaat Manajemen Strategis

Organisasi sektor pada dasarnya memerlukan manajemen strategis tersebut, meskipun dengan alasan yang berbeda, misalnya saja dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau dalam rangka terlaksananya tujuan organisasi dalam jangka panjang (bukan untuk meraih profit/ keuntungan).

Manajemen strategis sendiri berkembang melalui empat tahapan yang berurutan menurut Gluk, Kaufman dan Wallecck (Hunger dan Wheelwn, 2003). Dimana terlebih dahulu dimulai dengan perencanaan keuangan dasar, kemudian berkembang ke perencanaan berbasis peramalan, berkembang lagi ke perencanaan

strategis, baru kemudian bertransformasi ke manajemen strategis (Taufiqurohman, 2016) Secara umum ada tiga manfaat penerapan manajemen strategis bagi organisasi yaitu:

1. Akan lebih jelas visi dalam organisasi atau institusi dalam melaksanakan strategi
2. Fokus yang lebih tajam pada faktor yang krusial secara strategis;
3. Memahami perubahan lingkungan dengan cepat.

Sementara Taufiqurohman mengatakan ada beberapa manfaat manajemen strategis bagi organisasi (Taufiqurohman, 2016) yaitu:

1. Arah jangka panjang;
2. Organisasi bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat;
3. Organisasi menjadi lebih efektif;
4. Mencegah munculnya masalah di masa datang;
5. Mengurangi aktivitas yang tumpah tindih;
6. Mengubah mindset pegawai atau karyawan; dan
7. Meningkatkan kinerja.

2.1.4 Proses Manajemen Strategis

Proses dari manajemen strategis menurut Fred David terdiri dari:

1. *Strategic formulation*: yaitu membuat dan juga mengembangkan pernyataan-pernyataan misi dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman dari pihak eksternal, serta memilah kelebihan dan kekurangan dari pihak internal, dengan menentukan jangka panjang sebuah tujuan, merumuskan alternatif strategi, dan menetapkan salah satu strategi yang tepat untuk diterapkan. Pada

tahap ini dibutuhkan kapabilitas manajerial yang sangat bagus di mana kreativitas dan sensitivitas dari top manager sangat diperlukan. Keahlian dalam manajemen organisasi menjadi penentu utama keberhasilan formulasi strategi sebuah organisasi.

2. Strategic implementation: yaitu untuk menetapkan tujuan dari program, merancang kebijakan, untuk memberikan motivasi pada karyawan dan juga menyisihkan sumber daya yang ada untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan dari strategi, mengembangkan dan mendukung budaya organisasi agar terlaksananya sebuah strategi, terciptanya keefektifan struktur organisasi, menyediakan anggaran untuk organisasi, dan mengembangkan sistem manajemen informasi. Komunikasi menjadi hal yang krusial karena untuk menerjemahkan perencanaan strategis kepada manajer tingkat lini dan anggota sama, sehingga memiliki cara pemahaman yang sama pula. Susaha berjalan dengan baik tujuan implementasi.
3. Strategy evaluation: mengkaji faktor luar dan dalam yang menjadi basis strategi saat ini serta melakukan pengukuran kinerja program dan mengambil tindakan perbaikan. Jika ditemukan hambatan-hambatan serius dalam pelaksanaan strategi, perlu dilakukan identifikasi untuk meminimalisasi hambatan tersebut. Namun, jika terjadi kegagalan dari strategi yang dipilih, mungkin perlu penyusunan ulang strategi organisasi dengan menggabungkan lebih dari satu strategi atau memilih strategi lain. (Suaedi Falih, 2019)

2.2 Kemiskinan

Kondisi ketidakmampuan dari segi ekonomi dalam memenuhi takaran kehidupan disebut dengan kemiskinan. Rendahnya suatu pendapatan pada individu atau kolektif dalam mencukupi kebutuhan pokok entah berupa sandang, pangan, maupun papan. Serta berdampak pula pada pemenuhan taraf kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Menurut Sholeh (2010) beragam definisi mengenai kemiskinan mulai dari ketidakmampuan mencukupi kebutuhan primer dan memperbaiki kondisi, sedikitnya kesempatan berupaya, hingga definisi dalam arti yang lebih luas yaitu dengan mengikutsertakan adanya aspek sosial dan juga moral. (Khomsan Ali dkk, 2015). Sedangkan arti sempit dari kemiskinan ialah suatu kondisi kekurangan uang dan juga barang sebagai sarana keberlangsungan hidupnya.

Secara umum, kemiskinan bisa dijelaskan juga sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kolektif dalam hal pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari yang mengakibatkan orang tersebut tidak mampu menjamin keberlangsungan hidupnya. Kapabilitas penghasilan dalam hal ini ialah untuk mencukupi kebutuhan pokok untuk sehari-hari dimana berdasarkan kisaran harga umum sehingga kualitas hidupnya tidak terpenuhi. Penjelasan diatas bisa disimpulkan, kondisi kemiskinan adanya suatu ketidakmampuan ekonomi individu atau kolektif dalam mencukupi kebutuhan primer serta kebutuhan yang lain yang selaras kaidah kualitas hidup secara umum.

Definisi kemiskinan ini diulas kembali dan juga diperlebar berdasarkan masalah-masalah yang ada dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang individu

menjadi miskin. Menurut Chambers dalam (Khomsan Ali dkk, 2015), ia berpendapat jika kemiskinan ialah suatu *integrated concept* yang mempunyai lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (*proper*) ialah masalah dimana kondisi ketidakmampuan finansial untuk mencukupi kebutuhan paling mendasar. Konsep atau persepsi ini berlaku bukan hanya kepada kolektif yang tidak memiliki penghasilan, namun berlaku pula pada kolektif yang telah memiliki penghasilan.
2. Ketidakberdayaan (*powerless*) pada umumnya ialah rendahnya kapabilitas penghasilan yang berakibat juga terhadap kekuatan sosial (*social power*) seorang individu ataupun kolektif terutama dalam mendapatkan keadilan atau kesetaraan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*) ialah kondisi dimana seorang individu atau kolektif yang dikategorikan miskin jika tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi situasi diluar dugaan dimana pada situasi tersebut sangat memerlukan suntikan penghasilan untuk menyelesaikannya. Misalkan situasi rawan seperti bencana alam, kita pasti menghadapi keadaan kesehatan yang memerlukan pembiayaan obat yang cukup mahal, dan keadaan-keadaan darurat lainnya yang memerlukan kapabilitas penghasilan yang mampu menutupnya. Kondisi kemiskinan ini dinilai tidak mampu untuk melalui kondisi darurat misalnya seperti bencana alam.
4. Ketergantungan (*dependency*) ialah kondisi dimana seorang individu memiliki batasan kapabilitas penghasilan atau kekuatan sosial yang disebut miskin. Dimana suatu kondisi miskin bisa menyebabkan adanya ketergantungan

kepada pihak lain. Mereka menjadi tidak memiliki suatu kecakapan atau kemampuan untuk menciptakan solusi yang menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan terciptanya penghasilan baru. Sehingga pertolongan pihak luar sangat dibutuhkan oleh orang tersebut untuk menghadapi masalah-masalah terutama yang berhubungan dengan kebutuhan atas sumber penghasilan.

5. Keterasingan (*isolation*) merupakan dimensi yang dimaksud oleh Chambers sebagai suatu keadaan dimana individu atau kolektif yang menjadi miskin akibat faktor lokasi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat miskin yang hidup jauh dari pusat perkembangan ekonomi. Sehingga sebagian besar fasilitas kemakmuran sosial banyak yang terfokus di pusat saja atau perkotaan dan kota-kota besar saja. Dengan adanya hal ini tentu menyebabkan masyarakat yang hidup di daerah terpencil atau jauh dari pusat pertumbuhan seperti kota-kota besar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat yang ingin merasakan fasilitas kesejahteraan sosial sehingga dengan terjadinya kondisi tersebut bisa menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat yang berada di tempat jauh dari pusat perkembangan.

2.2.1 Bentuk-bentuk dan Jenis-jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dijabarkan oleh Chambers memberi kejelasan terkait adanya pelbagai bentuk permasalahan didalam kemiskinan serta pelbagai faktor mempengaruhi terbentuknya kemiskinan. Berlandaskan kondisi kemiskinan yang dinilai sebagai manifestasi masalah multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk yaitu, sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut ialah jenis kemiskinan yang mana keadaan penghasilan individu maupun kolektif ada dibawah garis kemiskinan, sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya seperti pangan, sandang, kesehatan, rumah, dan pendidikan yang layak sehingga mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Garis kemiskinan ini juga bisa dijabarkan sebagai rata-rata jumlah yang dikeluarkan atau konsumsi kebutuhan primer yang berhubungan dengan terpenuhinya taraf kemakmuran. Manifestasi kemiskinan absolut ini ialah yang terbanyak dipakai untuk konsep menetapkan atau menjabarkan kriteria individu atau kolektif yang disebut miskin.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif disebabkan oleh pengaruh dari suatu kebijakan pembangunan yang tidak meliputi secara menyeluruh lapisan masyarakat. Adanya hal ini tentu menyebabkan terjadinya kesenjangan penghasilan atau kesenjangan taraf kemakmuran. Dimana suatu daerah belum dimasuki oleh berbagai program pembangunan ekonomi, seperti di kota-kota besar tentu akan menyebabkan daerah tersebut menjadi tertinggal.

3. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural ialah manifestasi kemiskinan yang disebabkan oleh suatu sikap atau kebiasaan masyarakat yang berdasarkan pada budaya atau adat istiadat yang tidak mau untuk diubah melalui metode-metode yang modern. Kebiasaan ini biasanya berbentuk sifat pemalas, boros atau tidak pernah hemat, kreativitas rendah, sehingga hal tersebut mengakibatkan sering bergantung pada orang lain.

4. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural ialah kemiskinan akibat rendahnya akses terhadap sumber daya. Hal ini terjadi karena adanya tatanan sosial budaya atau pada sosial politik yang tidak begitu menyokong adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan yang begitu kadang kala mempunyai adanya unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural ini merupakan yang memperoleh atensi terbanyak dalam bidang ilmu sosial terutama golongan pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia.

Kemiskinan struktural dipandang sebagai bentuk kemiskinan yang paling

banyak memicu adanya kemiskinan dalam bentuk yang lain. Adapun beberapa jenis kemiskinan yang berdasarkan pada sifatnya ialah sebagai berikut:

1) Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi lantaran akibat adanya sumber daya alam yang langka dan sedikitnya sarana dan fasilitas umum seperti jalan raya, listrik, dan air bersih serta tidak gemburnya kondisi tanah. Daerah-daerah yang memiliki ciri khas seringkali ialah area yang belum tersentuh oleh kebijakan pembangunan sehingga tertinggal dibanding daerah lainnya.

2) Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan ialah kemiskinan yang terjadi akibat adanya sistem modernisasi atau pembangunan yang tidak merata lalu mengakibatkan masyarakat yang ada di daerah tertinggal atau daerah jauh dari pembangunan tidak mendapatkan peluang untuk mengatasi sumber daya, sarana, dan prasarana ekonomi yang rata. Kemiskinan ialah hasil dari dampak negatif

dilaksanakannya konsep pembangunan (*developmentalism*) yang dilakukan oleh beberapa negara yang masih berkembang. Dimana negara tersebut menginginkan adanya sasaran yang tinggi untuk mengejar target perkembangan ekonomi yang berakibat pada hasil-hasil pembangunan sektor industri yang dibagikan tidak rata, dimana mereka yang bekerja pada sektor pertanian tidak menikmati hasil keuntungannya.

Kedua macam kemiskinan diatas masih sering direlasikan dengan konsep pembangunan yang dari dulu telah dilakukan pelbagai negara berkembang pada kurun waktu 1970an dan 1980an (Tumiarsih Ika, 2019).

2.2.2 Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan

Skema terciptanya kemiskinan yang diutarakan oleh Chambers ialah ia menjelaskan bahwa kondisi yang menyebabkan individu atau kolektif dapat menjadi miskin di pelbagai negara berkembang dan negara dunia ketiga disebut dengan kondisi memiskinkan. Ditemukan bahwa sebagian besar kemiskinan selalu diukur/diungkap berdasar pada rendahnya suatu kapabilitas penghasilan dalam mencukupi kebutuhan primer yaitu seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Rendahnya kapabilitas penghasilan juga berdampak pada daya beli yang rendah atau ketidakmampuan untuk mengkonsumsi.

Rendahnya kapabilitas penghasilan tentu akan menyebabkan daya beli individu atau kolektif menjadi rendah dalam mencukupi kebutuhan pokok. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi yang cukup dan juga layanan kesehatan yang layak. Akibatnya, terjadi suatu kondisi ketidakmampuan dimana tidak tercapainya taraf kesejahteraan seperti berikut:

1. Tidak tersedianya pangan yang layak yang sesuai takaran gizi yang disyaratkan sehingga hal ini mengakibatkan adanya resiko menderita mal gizi atau kondisi rendah gizi yang akan berakibat rentan terhadap risiko penyakit menular.
2. Tidak terjaminnya kesehatan sehingga rentan terkena pelbagai penyakit menular serta ketidakmampuan untuk mengobati penyakit pun terbatas sehingga rawan adanya risiko kematian.
3. Perumahan atau pemukiman yang tidak layak ditempati ialah akibat dari terbatasnya penghasilan agar bisa mempunyai dan memperoleh hunian yang layak ditinggali. Kondisi ini juga akan memberi dampak pada kesehatan.
4. Taraf pendidikan yang rendah juga bisa dipicu oleh kondisi terbatasnya penghasilan dimana tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai taraf pendidikan yang ada.

Kondisi-kondisi diatas ialah akibat terbatasnya atau rendahnya penghasilan yang menjadi sebab terwujudnya keadaan kesehatan masyarakat yang dikategorikan rendah (morbiditas) atau ada dalam keadaan rendah gizi. Keadaan seperti ini sangat rawan pada serangan penyakit dan kekuarangan gizi yang akan diikuti tingat kematian yang tinggi (mortalitas).

Tingginya angka mortalitas juga keadaan dimana rendahnya kesehatan masyarakat akan berefek pula pada rendahnya keikutsertaan sosial, menjulang tingginya ketidakhadiran, rendahnya kecerdasan, dan keterampilan yang relatif rendah. Berikut ini ialah penjelasan mengenai masing-masing keadaan yang disebabkan oleh tingginya mortalitas maupun morbiditas.

- 1) Rendahnya taraf partisipasi sosial

Keadaan kesehatan ataupun rendahnya gizi bisa mengakibatkan daya tahan tubuh atau modal fisik yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara sosial menjadi turun. Hal ini disebabkan kesehatannya yang tidak prima sehingga tidak bisa mendukung partisipasi secara utuh baik pada lingkungan masyarakat maupun pada lingkungan pekerjaan. Sebagian besar kolektif masyarakat miskin relatif atau jarang ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial.

2) Absensi meningkat

Faktor kondisi kesehatan yang rendah tidak akan menyokong adanya aspek presensi dimana dalam aktivitas bermasyarakat baik di lingkup sosial, pendidikan, ataupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi dalam semua kegiatan menjadi semakin tinggi sehingga kehilangan kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkup sosial tersebut.

3) Rendahnya tingkat kecerdasan

Dengan adanya faktor gizi buruk atau rendahnya kualitas kesehatan yang akan berefek juga pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti yang telah diungkap bahwa kinerja otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah perlu gizi yang cukup dan memadai. Kekurangan gizi merupakan termasuk faktor paling utama terhadap menurunnya kualitas intelektual.

4) Keterampilan yang rendah

Pada prinsipnya, keterampilan ialah satu dari sekian manifestasi dari kreativitas. Aktivitas ini harus didukung dengan keadaan kesehatan yang memadai dan tentu harus memiliki kualitas intelektual yang mumpuni juga. Sehingga masyarakat yang menderita kekurangan gizi ataupun rawan terkena

gangguan kesehatan relatif sukar untuk mengembangkan keterampilannya. Hal ini disebabkan karena dukungan kesehatan untuk menunjang perkembangan kreativitas kerja relatif rendah sehingga akibatnya tidak memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kualitas keterampilannya.(Wini Hildegunda, 2010)

2.2.3 Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan

Secara umum ada beberapa faktor dalam memengaruhi tingkat kemiskinan anantara lain, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan naiknya kapasitas dalam kurun waktu yang lama suatu negara tertentu untuk memasok barang ekonomi untuk para warganya yang ditetapkan dengan terciptanya kemutakhiran atau adaptasi teknologi, institusi (lembaga), dan ideologi kepada pelbagai tuntutan kondisi yang tengah terjadi menurut Tadaro (2003). Menurut pendapat ekonomi klasik, Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus dan maupun menurut ekonomi neoklasik, Robert Solow dan Trover Swan menjabarkan bahwa secara elementer ada empat faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Jumlah stok barang modal
- 3) Luas tanah dan kekayaan alam
- 4) Tingkat teknologi yang digunakan

Perekonomian bisa dinilai bertumbuh juga berkembang manakala intensitas aktivitas ekonominya lebih tinggi dibandingkan yang sudah terjadi. Menurut pendapat Schumpater, aspek utama yang menjadi sebab perkembangan ekonomi ialah proses inovasi dan pelakunya yaitu seorang inovator atau seorang wiraswasta. Boediono (1985) menuturkan dalam Budhi (2013), pertumbuhan ekonomi ialah saat dimana naiknya output per kapita dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan menurut pendapat Todaro ada 3 (tiga) aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Akumulasi Modal

Semua investasi yang memiliki bentuk, misalnya tanah, bangunan, peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal bisa terwujud bila sebagian dari penghasilan masa kini disimpan lalu diubah menjadi investasi kembali yang bertujuan untuk menghasilkan output yang lebih besar pada waktu mendatang.

b. Pertumbuhan penduduk angkatan kerja

Pertambahan penduduk yang sangat berkorelasi dengan naiknya jumlah angkatan kerja sudah dipandang menjadi elemen yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Yang berarti semakin berlimpah angkatan kerja maka tenaga yang ada akan semakin menghasilkan, sedangkan semakin banyaknya penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

c. Kemajuan teknologi

Adanya kemajuan teknologi dikarenakan perlu diperbaikinya metode-metode lampau dalam melaksanakan pelbagai pekerjaan tradisional. Ada 3 (tiga) penggolongan suatu teknologi dikatakan bertambah maju yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kemutakhiran teknologi yang bersifat tidak memihak, keadaan ini bilamana hasil yang diraih output lebih tinggi dari kuantitas dan perpaduan komponen input yang tetap.
- 2) Adanya kemutakhiran teknologi yang cenderung bersifat menghemat tenaga kerja (labour saving) atau hemat modal (capital saving), sehingga taraf output bisa diraih lebih tinggi dengan pasokan tenaga kerja atau modal yang sepadan.
- 3) Adanya kemutakhiran teknologi yaitu dalam hal peningkatan modal, keadaan ini bilamana dalam penggunaan teknologi tersebut pengguna dimungkinkan untuk menggunakan barang modal yang tersedia secara produktif.

2. Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu upaya sadar yang direncanakan dalam menyelenggarakan nuansa belajar dan kegiatan pembelajaran supaya peserta didik secara aktif menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki seperti kemampuan spiritual, keagamaan, kontrol diri, persona individu, kecakapan, sikap baik, dan juga kapabilitas yang dibutuhkan dirinya, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan ialah menumbuhkembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, bersikap baik, mengamalkan ilmu, tanggap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Pendidikan formal

Pendidikan formal ialah jenjang pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan yang terdiri atas:

- a. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- b. Pendidikan Menengah, yaitu merupakan keberlanjutan dari pendidikan dasar dimana pendidikan menengah terdiri atas, Sekolah Menengah Atas (SMA ada juga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA), dan beberapa bentuk lainnya yang setara.
- c. Pendidikan Tinggi, yaitu merupakan keberlanjutan pendidikan sesudah pendidikan menengah atas dimana yang meliputi program pendidikan Diploma, Sarjana, dll.

2) Pendidikan Non Formal

Merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal atau taraf pendidikan pada umumnya yang dapat dijalankan sesuai struktur dan berjenjang. Sedangkan Pendidikan non formal diperuntukkan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang mana berfungsi untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal.

3) Pendidikan Informal

Jalur pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang ada dalam lingkungan sekitar dan keluarga sendiri yang berwujud kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal dapat juga dinilai sama dengan seperti pendidikan formal ataupun informal usai peserta didik dinyatakan lulus ujian yang berstandar nasional seperti sekolah formal pada umumnya.

3. Pengangguran

Pengangguran ialah individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan yang ingin memperoleh kerja tapi masih belum dapat mendapatkannya. Permasalahan pengangguran ini juga yang mengakibatkan tingkat pemasukan nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat sampai pada potensi puncak yaitu salah satu masalahnya ialah permasalahan utama makro ekonomi yang paling pokok.

1) Jenis-jenis pengangguran

Pengangguran bisa ditafsirkan juga sebagai usia kerja yang belum memiliki pekerjaan atau tidak bekerja secara optimal. Pengangguran ini dapat diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*) ialah usia kerja yang tidak bekerja secara optimal dikarenakan ada suatu latar belakang tertentu.
- b. Menganggur/pengangguran (*Under Unemployment*) ialah suatu kondisi dimana tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan tidak adanya lapangan kerja, yang biasanya bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

- c. Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*) ialah seorang individu atau usia kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Pengangguran kategori ini cukup melimpah karena memang belum memperoleh pekerjaan walaupun sudah berjuang secara maksimal untuk mendapatkan pekerjaan.

2) Macam-macam pengangguran

Berdasarkan penyebab terjadinya seorang individu bisa menganggur, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pengangguran konjungtural atau (*Cycle Unemployment*) ialah pengangguran yang disebabkan oleh berubahnya gelombang (fluktuasi) sehingga kehidupan ekonomi/siklus ekonominya menjadi tidak stabil.
- b. Pengangguran struktural atau (*struktural unemployment*) ialah pengangguran yang disebabkan oleh berubahnya struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam kurun waktu yang lama. Pengangguran struktural bisa terjadi karena pelbagai kemungkinan, misalnya seperti: dampak permintaan menurun, dampak kemutakhiran dan teknologi di era global saat ini, dan juga dampak dari keputusan pemerintah.
- c. Pengangguran friksional atau (*Frictional Unemployment*) ialah pengangguran yang timbul sebagai dampak dari ketidakselarasan yang terjadi antara pemberi pekerjaan dan pencari pekerjaan. Pengangguran ini acap kali juga dikenal dengan pengangguran sukarela.

- d. Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang tercipta sebab bergantinya musim yaitu misalnya tanam ke musim panen, contohnya seperti petani yang menanam buah musiman.
- e. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang mana diakibatkan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin, yang mengakibatkan manusianya menganggur.
- f. Pengangguran siklus ialah pengangguran yang tercipta akibat menurunnya suatu kegiatan pada siklus ekonomi yang terjadi akibat adanya resesi. Lalu pengangguran siklus diakibatkan oleh keadaan dimana berkurangnya permintaan masyarakat (*agrerat demand*).

Indikator pengangguran terbuka yang dipergunakan oleh BPS biasanya ialah tingkat pengangguran terbuka atau (TPT). Menurut Tambunan, itu bisa memberikan pengaruh taraf kemiskinan dengan pelbagai macam cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika rumah tangga mempunyai batasan likuiditas, artinya bahwa konsumsi hari ini sangat terpengaruhi oleh jumlah penghasilan hari ini pula, maka bencana pengangguran ini akan dapat secara langsung berdampak pada *income Proverty* dengan *consumption poverty rate*.
- 2) Jika rumah tangga tidak berhadapan dengan batasan likuiditas, yang bisa ditafsirkan bahwa konsumsi hari ini tidak terlalu terpengaruh oleh penghasilan yang ada hari ini, maka meningkatnya pengangguran akan mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dalam kurun waktu yang lama, tetapi tidak mempengaruhi dalam kurun waktu yang pendek. Tingkat penambahan tenaga

kerja yang cepat dan penambahan lapangan kerja yang lambat akan mengakibatkan permasalahan pengangguran akan terus meningkat.

4. Kependudukan

Penduduk memiliki peran yang sangat krusial didalam pembangunan pada suatu area. Maka dari itu perlu atensi bukan hanya pada sisi jumlah penduduk melainkan juga pada kualitas penduduk. Penduduk yang memiliki kualitas ialah modal yang besar bagi pembangunan yang bisa diekspektasikan untuk mengatasi berbagai dampak adanya dinamika penduduk (BPS, 2011).

Pertambahan penduduk yang tinggi akan memberikan pengaruh pada taraf padatnya penduduk yang ada di area tersebut. Padatnya penduduk ini juga dinyatakan dengan jumlah orang dalam satuan luas lahan (per km², per mil) di suatu area. Laju pertumbuhan penduduk biasanya disebabkan oleh tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Dengan begitu, jumlah usia kerja secara otomatis akan memikul tanggungan yang lebih berat untuk menafkahi anak-anak yang masih berusia dibawah 14 tahun. Penduduk yang sudah lanjut usia atau yang masih anak-anak secara ekonomis dikategorikan sebagi beban ketergantungan yang berarti mereka ialah bagian masyarakat yang tidak menghasilkan, sehingga hal tersebut menjelma beban usia kerja yang menghasilkan.

Laju bertambah ataupun menurunnya penduduk tidaklah cukup mendeskripsikan keadaan kemiskinan yang sesungguhnya ada dalam suatu wilayah. Dalam korelasinya dengan taraf kemiskinan, selain jumlah penduduk harus diperhatikan pula variabel yang lain, misalnya kemakmuran masyarakat di area itu sendiri yaitu pada taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat

tersedianya lapangan pekerjaan, serta laju perkembangan ekonomi. Sehingga jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan dalam perkembangan manusia seyogyanya mampu untuk mengurangi taraf kemiskinan di wilayah itu.

5. Kesehatan

Pembangunan pada kesehatan ialah usaha dalam menyediakan satu dari sekian hak dasar rakyat ialah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Pembangunan kesehatan juga harus dinilai suatu investasi yang mana untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan juga sebagai bentuk dukungan pada pembangunan ekonomi, serta memainkan peran yang sangat krusial dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan ialah dengan meningkatkan akses kesehatan untuk masyarakat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk meningkatkan pencegahan dan meanggulangi penyakit menular seperti polio dan flu burung. Ditingkatkannya kualitas pelayanan kesehatan dasar yang merata dan terjangkau, ditingkatkannya kualitas dan kuantitas tenaga medis, keterjaminan mutu, keamanan, khasiat obat, dan makanan, penanganan kesehatan di daerah bencana, serta ditingkatkannya penyuluhan kesehatan dan diberdayakannya masyarakat.

Kapabilitas untuk bisa bertahan hidup jangka panjang dapat diukur dengan indikator harapan hidup pada saat dilahirkan (*life expectancy at birth/e0*). Angka untuk tingkat provinsi yang ditunjukkan ialah hasil setelah dihitung secara tidak langsung dengan menerapkan paket program *mortpack* yang berdasar pada data rata-rata jumlah anak lahir dengan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut

umur ibu 15-49 tahun. Sumber data berasal dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau (Susenas) dengan menampilkan tren hasil sensus penduduk. Selain angka kematian bayi, Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu juga diperhitungkan sebagai indikator untuk mengkaji taraf kesehatan penduduk. Jika di suatu daerah angka harapan hidup tinggi maka dapat diindikasikan bahwa perkembangan sosial ekonomi terutama menyangkut fasilitas kesehatan daerah tersebut juga bertambah maju. Semakin maju perkembangan daerah pada bidang kesehatan mengindikasikan bahwa taraf kesehatan yang bisa digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat tak terkecuali masyarakat miskin yang tidak tersentuh layanan kesehatan yang layak.

Menurut teori tentang lingkaran kemiskinan yang diutarakan oleh Myrdal bahwa semakin taraf kesehatan masyarakat tinggi maka akan semakin tinggi pula juga nilai Angka Harapan Hidup (AHH) begitupun angka produktivitas akan terus menjulang. Meningkatnya produktivitas bisa menjadi pendorong laju perkembangan ekonomi yang kemudian akan membuat turun taraf kemiskinan yang mana semakin tingginya angka harapan hidup maka taraf kemiskinan akan turun (Yuz Muhammad Irfansyah, 2015).

2.3 Analisis SWOT

Teknik analisis SWOT biasanya diterapkan dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan, khususnya untuk membuat Rencana Strategis atau (Renstra). Teknik perencanaan ini menjadi populer untuk digunakan karena dapat digunakan untuk membuahakan suatu strategi pembangunan yang lebih terarah dan selaras dengan potensi yang ada di daerah atau institusi tertentu. Di samping itu,

dengan menerapkan teknik analisis SWOT akan membuahkan hasil program dan kegiatan yang lebih sesuai untuk mengambil peluang dari luar untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi dari dalam. Dengan demikian penggunaan analisis SWOT bisa mewujudkan analisis strategi yang lebih konkret dan realistis yang mana selaras dengan kondisi dan situasi yang terjadi di daerah atau institusi tertentu. Tidak mengherankan jika teknik analisis SWOT menjadi populer dikalangan aparat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dimana digunakan untuk penyusunan dokumen rencana pembangunan.

Analisis SWOT dasarnya merupakan metode atau teknik untuk mengenali apa saja faktor dan juga unsur yang digunakan untuk menentukan pembangunan didalam institusi terkait dengan secara sistematis. Teknik analisis SWOT memiliki tujuan dalam melaksanakan evaluasi terhadap kondisi lingkup kegiatan yang dilakukan pada instansi terkait yang kemudian dapat diimplikasikan untuk merencanakan strategi pembangunan dengan tepat dan selaras dengan keadaan dan potensi institusi yang berhubungan. Dalam pengaplikasiannya, institusi yang dimaksud disini misalnya seperti perusahaan, organisasi dan instansi pemerintah. Analisis SWOT ini ditentukan berdasar pada kondisi umum institusi yang berhubungan baik yang bersifat eksternal maupun internal dimana untuk menggapai tujuan serta visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya oleh para pengambil keputusan. Istilah SWOT ini ialah singkatan dari empat kata, yaitu: *Strength* atau kekuatan, *Weaknesses* atau kelemahan, *Opportunities* atau peluang, dan *Threat* atau ancaman. Keempat unsur ini ialah aspek krusial yang

perlu dibahas untuk mengetahui keadaan dan masalah yang dihadapi oleh suatu daerah atau institusi tertentu. Adapun penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Strength* (kekuatan) ialah kelebihan yang ada pada suatu daerah atau institusi yang tidak dimiliki oleh daerah atau institusi lainnya. Dalam analisis keadaan ekonomi daerah, kekuatan tersebut bisa timbul dalam wujud tingkat kesuburan tanah yang lebih gembur, potensi sumber daya alam yang lebih besar dan bernilai tinggi, kualitas pendidikan yang lebih baik, kondisi keuangan yang lebih mapan dan lain-lainnya. Analisis akan lebih menjadi konkret dan meyakinkan bilamana semua unsur kekuatan ini dapat dibuktikan secara kuantitatif dengan menerapkan indikator dan data pendukung tertentu.
2. *Weaknesses* (kelemahan) pada dasarnya ialah kekurangan atau kelemahan yang ada pada suatu daerah atau institusi tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah atau institusi lainnya. Dalam analisis kondisi sosial ekonomi, unsur kelemahan ini pada dasarnya merupakan lawan dari unsur kekuatan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Kelemahan bisa timbul dalam bentuk tingkat kegemburan lahan yang relatif rendah, potensi sumber daya alam yang relatif kecil dan terbatas, posisi daerah yang kurang menguntungkan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Mengenai kelemahan ini akan lebih menjadi konkret apabila disokong dengan data serta informasi yang akurat dan juga bersifat kuantitatif atau terukur.
3. *Opportunities* (peluang) dijabarkan sebagai kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan bisa dipergunakan untuk mendorong proses pembangunan daerah atau institusi bersangkutan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya

bahwa peluang ini ialah unsur yang datang dari luar (eksternal), baik dari ekonomi, sosial dan kebijakan, dan aturan pemerintah atau karena adanya perubahan teknologi baru. Dari segi sosial ekonomi, peluang tersebut dapat timbul dalam wujud adanya minat masyarakat yang cukup tinggi pada salah satu atau beberapa unsur pembangunan daerah, meningkatnya daya beli masyarakat, dengan adanya kebijakan dan aturan baru pemerintah yang bisa menciptakan kesempatan terjadi suatu pengembangan akibat karena terdapat perubahan teknologi dan ditemukannya produk baru yang dapat menyokong proses pembangunan daerah atau institusi terkait sama dengan hal yang dulu, analisis akan lebih menjadi konkrit dan juga apabila semua unsur peluang tersebut bisa ditimbulkan dengan data dan juga informasi yang kuantitatif akan menjadi lebih terukur.

4. *Threat* (Ancaman) merupakan keadaan atau masalah yang datangnya dari luar dan bisa mengakibatkan kesulitan atau masalah serta hambatan atau tantangan yang cukup serius untuk suatu daerah atau institusi. Ancaman dapat muncul lalu mengakibatkan adanya kemajuan dan mengubah kondisi sosial ekonomi, dimana kebijakan dan aturan yang berubah terjadi karena terdapat berubahnya pandangan dan juga kemajuan teknologi atau kondisi ketertiban dan keamanan yang dapat menimbulkan bahaya pada proses pembangunan atau perubahan pada persepsi masyarakat dan juga pada kemajuan teknologi informasi yang dapat memunculkan ancaman dari luar untuk suatu daerah atau institusi bersangkutan (Sjafrizal, 2015).

Teknik analisis SWOT ternyata sudah banyak dikenal dan bahkan cukup populer sebagai salah satu teknik praktis yang dapat digunakan oleh para pengusaha dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Kemudian teknik SWOT menjadi sangat populer juga di dalam penyusunan RPJMD suatu daerah dan Renstra untuk dinas dan instansi pemerintah terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2001. Secara khusus ada dua kegunaan utama jika menerapkan teknik analisis SWOT dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Pertama, dengan menerapkan teknik analisis SWOT maka pembahasan mengenai keadaan daerah secara umum atau suatu instansi baik menyangkut kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang akan menjadi lebih tajam dan juga terarah. Perumusan perencanaan, baik untuk strategi, kebijakan, dan program pembangunan akan lebih menjadi tepat, konkrit, dan terarah jika analisis tentang keadaan daerah secara umum tersebut dapat dijalankan dengan metode yang lebih baik dan juga tajam.

Kedua, rumus strategi pembangunan daerah akan lebih menjadi lebih tajam dan juga terarah selaras dengan potensi serta keadaan yang terdapat di daerah dan institusi terkait. Yang memungkinkan keberhasilan peangaplikasian strategi pembangunan daerah terkait akan menjadi lebih besar. Hal ini akan sangat krusial jika strategi pembangunan yang dicanangkan hanya berdasarkan secara umum dan tidak selaras dengan potensi yang terdapat di daerah, maka kemungkinan tercapainya target pembangunan daerah tersebut menjadi kecil atau gagal.

Meskipun teknik analisis SWOT ini sangat populer tetapi tidak dapat dibantah jika teknik ini pun memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Kekurangan pertama yang ada didalam analisis SWOT ialah tingkat subjektivitas perencana yang tinggi dalam menjalankan analisis. Hal ini begitu kentara dalam menetapkan unsur-unsur pada analisis SWOT seperti kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Oppurtunities*), dan ancaman (*Threats*). Maka dari itu diperlukanlah hal yang dapat meninggikan objektivitas dari analisis SWOT ini dan seyogyanya analisis tersebut disokong juga dengan mempergunakan data-data kuantitatif terutama didalam menetapkan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
2. Kelemahannya dari teknik analisis SWOT masih belum bisa diimplikasikan secara terhubung dan juga sistematis dengan pencaangan anggaran yang memerlukan hal yang harus terhubung dan sistematis dengan mempergunakan pencaangan anggaran yang dikeluarkan untuk memanifestasi strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang telah dicanangkan. Teknik analisis yang juga menerapkan SWOT, tapi terhubung langsung dengan aspek penganggaran yaitu ialah teknik Balance Score-card yang dijabarkan oleh mulyadi (Sjafrizal, 2015).

Teknik analisis SWOT ini menggunkana faktor internal dan eksternal yang kemudian dilaksanakan dengan menerapkan analisis dan evaluasi untuk mengungkap apa saja kelemahan dan kekuatan dalam strategi tersebut dan juga mengevaluasi kesempatan dan kendala yang dihadapi didalam melakukan suatu

tugas. Kondisi lingkungan dalam berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan yang berasal dari institusi terkait sedangkan keadaan lingkungan luar berkorelasi dengan kesempatan dan hambatan yang bisa datang dari luar instansi. Kemudian untuk dapat memecah isu dalam peta atau faktor strategi yang dapat diterapkan berikut analisis SWOT dalam bentuk tabel matrik:

Tabel 2.1 Matrik Analisis SWOT untuk Perumusan Strategi

Internal Eksternal	Strengths (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki organisasi atau institusi.	Weaknesses (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki organisasi atau institusi.
	Opportunities (O) Hasil identifikasi dari semua peluang yang ada dari luar institusi	Threat (T) Hasil identifikasi semua ancaman yang berasal dari luar institusi
	Strategi (SO) menerapkan semua kekuatan yang dimiliki dan juga memanfaatkan semua peluang yang ada.	Strategi (WO) mengatasi semua kelemahan dari dalam dengan memanfaatkan semua peluang yang ada.
	Strategi (ST) menerapkan semua kekuatan dari dalam untuk menghindari pelbagai ancaman. Dari luar	Strategi (WT) Tangani semua kelemahan dari dalam dan cegah semua ancaman yang datang dari luar

Seperti dikutip dalam (Fahmi, 2015:265) ada beberapa strategi yang bisa didapat dan digunakan dari teknik Analisis SWOT sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunities*) yaitu strategi dengan cara memanfaatkan kekuatan atau kelebihan yang ada dalam institusi untuk bisa mendapatkan kesempatan/menentukan perpaduan kekuatan dan peluang yang bisa mempergunakan kekuatan yang ada untuk mendapatkan strategi dengan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya.

2. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) yaitu, strategi dengan cara mengurangi kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada institusi itu sendiri yang kemudian digunakan untuk bisa merebut kesempatan yang terdapat di lingkungan luar atau eksternal dengan memanfaatkan kesempatan yang bisa memberi keuntungan.
3. Strategi ST (*Strength-Threat*) ialah strategi yang memberdayakan kekuatan atau kelebihan yang berasal dari dalam institusi dimana digunakan untuk melenyapkan ancaman dari luar atau menghadapi ancaman yang berasal dari luar instansi tersebut.
4. Strategi WT (*Weakness-Threat*) ialah strategi dengan cara menghadapi kelemahan yang terletak di internal atau institusi itu sendiri untuk mengecilkan kelemahan yang ada guna menyingkar dari ancaman yang akan datang berasal dari eksternal atau dari luar instansi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Iwan Satibi dan Undang Sudrajat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 9, No 2 (2019) P-ISSN: 2303-3169, E-ISSN: 2579-3098 yang berjudul Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia Kota Tasikmalaya dengan mempergunakan model benchmarking. Metode campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian menemukan hasil bahwa implementasi kebijakan

penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, perlunya strategi untuk merampingkan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang mengacu pada hasil benchmarking. Hasilnya mencakup dua hal utama, yaitu kebutuhan akan kemauan politik daerah kepala dan pembentukan lembaga khusus yang menangani kemiskinan.(Satibi Iwan, 2019).

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar, Asna Aneta Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Tahun 2010, P-ISSN: 2086-6364, E-ISSN: 2549-7499 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo dimana Penelitian ini memiliki tujuan untuk: mengungkap dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Gorontalo, dan untuk mengungkap serta menganalisis tingkat responsivitas pemerintah Kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan juga untuk mengungkap dan menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus diterapkan dalam penelitian ini. Wawancara dan *focus group discussion* (FGD) diaplikasikan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai harapan

tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo juga tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi ialah faktor-faktor yang berperan terhadap berhasilnya implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo. (Aneta Asna, 2010).

Volume 10 No.1 Tahun 2015, P-ISSN: 2085-1960, E-ISSN: 2684-7868, Jurnal Paradigma Ekonomi, Syaparuddin, S., Artis, D., & Nurhayani, N. Dengan judul Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Batang Hari). Pemerintah sudah berusaha dengan keras untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kab. Batang Hari. Dengan hal ini diwujudkan melalui adanya pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan terkhusus program yang berbasis untuk memberdayakan masyarakat dan program untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang Hari saat ini tengah berusaha dengan keras agar jumlah penduduk miskin dari pelbagai dimensi turun yaitu dengan menyusun dokumen perencanaan yang didalamnya termuat strategi penanggulangan kemiskinan untuk daerah ini. Adapun Populasi miskin ialah seluruh rumah tangga sangat miskin atau (RTSM) yang ada di Kabupaten Batang Hari. Dengan mempergunakan presisi tertentu, dan jumlah sampel (sampling fraction) yang sudah ditetapkan sebanyak 308 RTSM. Pelaksanaan semua kegiatan dalam strategi Penanggulangan kemiskinan ini, bukan berarti akan merampungkan semua perkara kemiskinan yang ada di Kabupaten Batang Hari. Karena perkara kemiskinan ialah bukan

perkara mudah melainkan perkara yang multi kompleks yang harus diurus secara holistik dan simultan serta terus menerus, termasuk sikap hidup keluarga miskin yang ingin keluar dari kemiskinan. (Syaparuddin, 2015).

Volume 15 No.2 Tahun 2012, ISSN: 1693-8186, E-ISSN: 2407-1633, Putriana dengan judul Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana salah satu pada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi atau dari pemerintahan suatu daerah ialah miskin yang pada dasarnya dikurangi ialah pembangunan untuk melakukan peningkatan kemakmuran masyarakat secara adil dan selaras. Pengembangan tujuan ini sangat terkait erat dengan usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan penghasilan. Kemiskinan di Provinsi Riau ialah salah satu masalah yang dihadapi dalam berhasilnya pembangunan jika dilihat dari sisi yang muncul ekonomi karena ketidaksetaraan dalam hal pemilik sumber daya yang menciptakan kesetaraan dalam distribusi penghasilan, kualitas sumber daya manusia yang berbeda, dan berbedanya akses pada modal dan pekerjaan disana yang rendah. Usaha telah dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan dengan mempromosikan pemberdayaan ekonomi orang melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM). UKM memiliki peran strategis di tingkat nasional dalam membangun ekonomi yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi, lapangan pekerjaan dan penyaluran hasil pembangunan. Peran yang sangat krusial dapat dilihat dari perspektif pekerjaan dan penghasilan bagi kaum miskin, distribusi pendapatan, pengurangan pepatah dan pembangunan ekonomi. Tujuan utamanya ialah pemberdayaan UKM untuk meningkatkan produktivitas UKM,

mempromosikan efektivitas program dan kegiatan terkait pemberdayaan UKM. Pemberdayaan dan pengembangan UKM dalam menanggulangi kemiskinan ialah memberi akses kepada orang miskin untuk bisa turut serta dalam bisnis dan aktif dalam kegiatan bisnis yang produktif dan mempromosikan kewirausahaan, terutama diantara daerah miskin atau tertinggal.(Putriana, 2012).

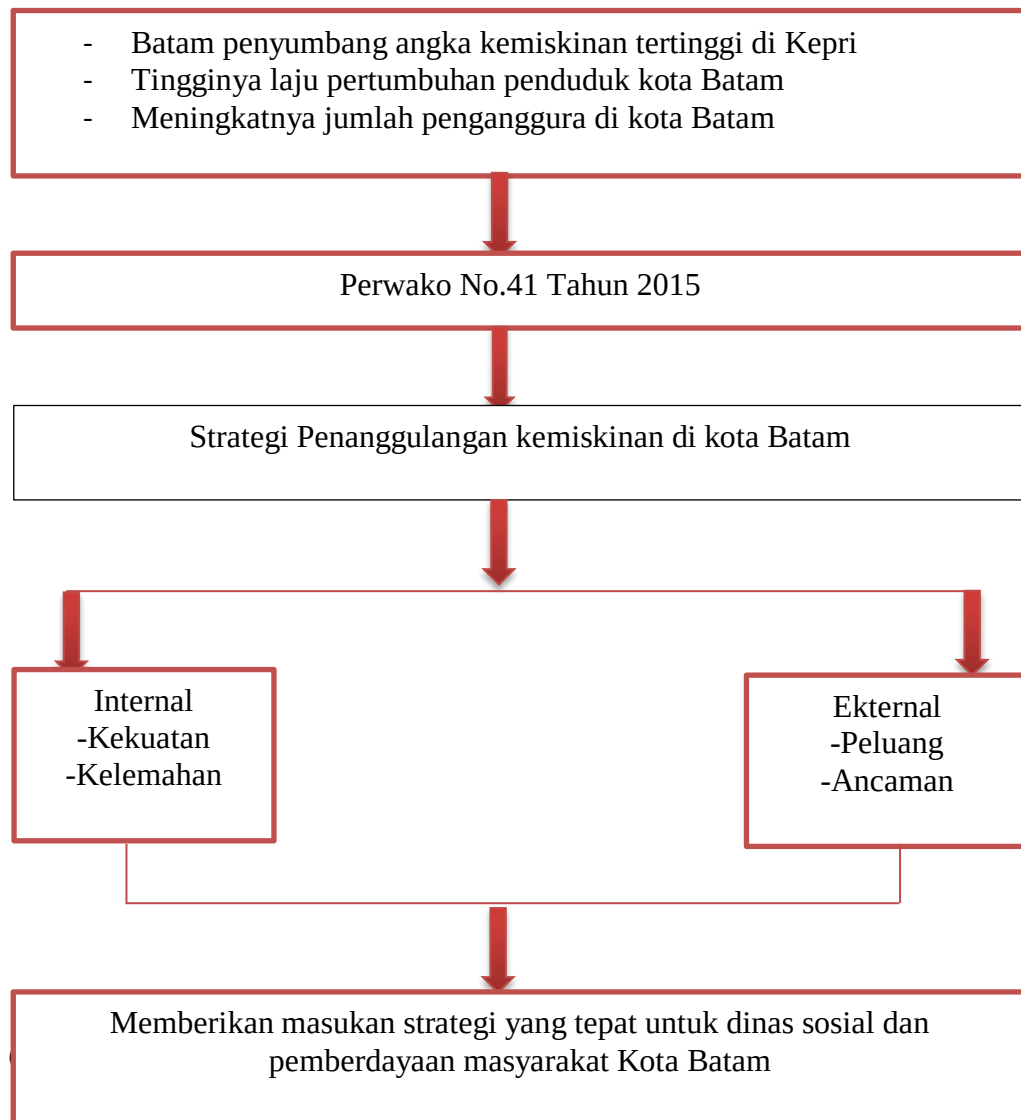
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), ISSN: 2442-6962, Volume 4 No.2 Tahun 2015, Program Megister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya dengan judul Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. Penelitian ini merupakan hasil Pemerintah kota Balikpapan didalam menanggapi isu kemiskinan telah menaruh atensi yang sangat serius, yaitu dengan dibuatkannya peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 guna memayungi usaha pemerintah kota Balikpapan didalam pengentasan kemiskinan di Kota Balikpapan. Dengan seiring berlalunya waktu, niscaya akan terdapat dinamika lingkungan dalam isu kemiskinan terjadi. Tuntutan kebutuhan strategi pengentasan kemiskinan diwajibkan dapat menyelesaikan semua perkara kemiskinan yang berlangsung di daerah. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan perlu diuji signifikansinya terhadap perkara kemiskinan melalui persepsi kajian uji kebijakan publik. Sehingga adanya relevansi eksistensi peraturan daerah penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinilai seberapa jauh tingkat kesuksesannya. Lalu akan memicu modifikasi atau perubahan kebijakan yang bisa menjadi solusi perkara kemiskinan di kota Balikpapan, pada masa kini dan masa yang akan datang (Fachrudin Reza, 2015).

Volume 22 No.1 Tahun 2014 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, ISSN: 2503-0272, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial, Kewirausahaan sosial merupakan pemikiran perubahan sosial yang berdasarkan pada pendekatan kewirausahaan. Fenomena kewirausahaan sosial sudah tumbuh dengan cepat selaras dengan pelbagai usaha untuk menyelesaikan pelbagai masalah sosial, seperti memperbaiki ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran tentang kewirausahaan sosial yang berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berdampak pada penurunan kemiskinan yang terfokus pada *social business*. Bina Swadaya dan Mitra Bali ialah entitas *social business* yang dikaji dalam studi kasus tersebut. Analisis kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini, kewirausahaan sosial mendeskripsikan peran yang nyata juga krusial dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Pembuatan nilai sosial dan inovasi ialah instrumen utama dalam kewirausahaan sosial. Bina Swadaya dan Mitra Bali memiliki peran dalam menyokong perbaikan ekonomi masyarakat dan sebagai usaha melakukan pengurangan kemiskinan. Tujuan sosial yang berdampak untuk memberdayakan masyarakat ialah nilai yang sangat krusial dalam praktik kewirausahaan sosial (Firdaus Nur, 2014).

Volume 4 No.2 Tahun 2014, P-ISSN: 2087-2038, E-ISSN: 2461-1182, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Analisis Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan didalam penelitian dalam hal ini ialah studi regresi multi-linear,

merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat efek independen variabel yang, tingkat pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat konsumsi rumah tangga, tingkat pendidikan, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2012. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan per kapita, inflasi, indeks pembangunan manusia tingkat pendidikan (IPM), dan Konsumsi dengan cara simultan dengan mempengaruhi variabel pada tingkat kemiskinan, dapat dilihat dari tes yang menunjukkan tingkat signifikansi $f < 0,05$. Dan dari R square diketahui bahwa variabel independen dapat menjelaskan kemiskinan taraf sebesar 56 persen dan sisanya 44 persen akan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperiksa dalam penelitian ini (Pratama Yoghi Citra, 2014)

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini ialah penelitian kualitatif dimana jenis penelitian kualitatif ini sangat bergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, dalam mengumpulkan sebagian besar terdiri atas kata-kata atau teks dari informan atau partisipan, yang menjabarkan dan melaksanakan analisis terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subjektif. Para peneliti dengan jenis penelitian kualitatif ini biasanya akan memilih teknik pengumpulan data dari berbagai sumber misalnya seperti wawancara secara struktur, observasi, dokumentasi, dan informasi audiovisual dibanding hanya mengandalkan satu sumber data saja. (Creswell, 2016).

Data yang digunakan peneliti ialah data primer yang didapat langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau memanfaatkannya. Data primer merupakan data sensus karena dikumpulkan, diolah, serta diterbitkan oleh biro pusat statistik (Pasolong, 2016) .

3.2 Fokus Penelitian

Penggunaan fokus pada penelitian kualitatif ini agar peneliti lebih memusatkan atensi terhadap permasalahan yang ada agar tidak menjadi luas. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan terfokus pada 2 program bantuan sosial

yaitu Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) dan program bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana 2 program bantuan tersebut dalam rangka pengurangan angka kemiskinan yang ada di Kota Batam. Penelitian juga akan dilakukan kepada masyarakat yaitu penerima bantuan sosial 2 program tersebut di Kelurahan Tiban Lama.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan peneliti untuk mengumpulkan data ialah suatu hal yang krusial dalam melakukan penelitian, karena metode yang akan dipilih ialah strategi atau metode yang diaplikasikan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang akan dibutuhkan dalam penelitiannya untuk mendapatkan pelbagai bahan, keterangan, pelbagai kenyataan, dan juga informasi yang dipercaya. Metode pengumpulan data yaitu teknik atau langkah-langkah yang bisa diambil oleh peneliti guna mengumpulkan data yang diinginkan. (Sudaryono, 2018). Berikut teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

1. Menurut (Pasolong, 2016) teknik observasi yaitu cara dengan mempergunakan observasi secara langsung dengan sistematis pada pelbagai gejala yang akan diteliti. Oleh karenanya teknik observasi ini menjadi satu dari sekian teknik pengumpulan data jika penelitian tidak sesuai dengan tujuan penelitian, atau yang dicanangkan dan dicatat secara sistematis, dan dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya.
2. Wawancara, pada penelitian kali ini penulis menerapkan teknik wawancara struktur yang dilakukan secara langsung terhadap responden atau informan

yang mana sudah disiapkan pertanyaan sebelumnya oleh peneliti untuk mendalami informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Pasolong, 2016).

3. Dokumentasi merupakan cara untuk mendapat data langsung dari tempat peneliti yang terdiri atas foto-foto, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan pelbagai data yang relevan dengan penelitian..

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini menerapkan teknik *judgemental sampling* menurut (Siregar, 2010) dalam (sudaryono, 2018) pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan ialah wujud penentuan sampel nonprobabilitas yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pengambilan sampel ini berlangsung apabila peneliti ingin memilah anggota sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Oleh karena itu, menentukan subjek atau informan yang dipilih harus sesuai sampel yang mewakili penelitian. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menentukan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Memahami persoalan dari pertanyaan yang diajukan
2. Terlibat dalam program bantuan pengentasan kemiskinan baik penyalur/penerima
3. Memiliki waktu luang untuk di wawancarai

3.5 Analisis Data

1. Reduksi Data, Yaitu langkah pemilihan, pemusatan terhadap data-data kasar yang didapat di lapangan.

2. Penyajian Data, Informasi yang berkemungkinan memberi adanya penentuan kesimpulan dan pengambilan tindakan

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini salah satu cara untuk menguji keabsahan hasil penelitian yaitu dengan menerapkan triangulasi penelitian. Adapun menurut (Sugiyono, 2016) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji kredibilitas atau keyakinan terhadap data hasil penelitian antara lain yaitu dengan menggunakan :
 - a. Perpanjangan pengamatan, artinya peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu dengan melaksanakan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah dijumpai ataupun yang baru agar peneliti dapat mendalami dan mendapatkan informasi yang lengkap.
 - b. Menggunakan bahan referensi lain misalnya seperti buku yang ada pada perpustakaan atau berdasarkan hasil pengamatan yang didukung dari tempat penelitian seperti foto, gambar, dan tabel .
 - c. Triangulasi ialah suatu pengujian kredibilitas yang dapat juga dikatakan sebagai pengecekan dari pelbagai sumber dengan mempergunakan pelbagai teknik dan waktu.

2. Uji Transferability

Dalam menyusun laporan penelitian, peneliti harus dapat memberi penjabaran atau uraian yang jelas dan kriteria yang dapat dipercaya, jelas, dan harus sistematis.

3. Uji Depenability

